



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 INSPEKTUR JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andap Budhi Revianto

Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yasonna H. Laoly

Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2020

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,
Inspektur Jenderal

Andap Budhi Revianto
NRP. 66060438

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTUR JENDERAL DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Maturitas SPIP	3 (terdefinisi)
		2. Opini Atas Laporan Keuangan	WTP
		3. Indeks Persepsi Integritas	66,0

Sasaran Program Dukungan Manajemen Unit Inspektorat Jenderal	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	1. Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM	WTP
Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	2. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM	Level 3 - Terdefinisi
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis Teknologi Informasi	3. Persentasi Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal "BB"	92 %
	4. Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 90	92 %
	5. Persentase Satuan Kerja yang Berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM	6 %
	6. Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	66,0

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	3 (integrated)
2.	Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	1. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	52 %
		2. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	62 %
		3. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	82 %
		4. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	22 %
		5. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	78 %
		6. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL I yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	6,0 %
3.	Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	3 (integrated)
4.	Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	1. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	52 %
		2. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	62 %
		3. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	82 %
		4. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	22 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		5. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	78 %
		6. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL II yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	6,0 %
5.	Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting	1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	3 (integrated)
6.	Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	1. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	52 %
		2. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	62 %
		3. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	82 %
		4. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	22 %
		5. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	78 %
		6. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL III yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	6,0 %
7.	Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting	1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	3 (integrated)
8.	Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	1. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	52 %
		2. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	62 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		3. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	82 %
		4. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	22 %
		5. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	78 %
		6. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL IV yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	6,0 %
9.	Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting	1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	3 (integrated)
10.	Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	1. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	52 %
		2. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	62 %
		3. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	82 %
		4. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	22 %
		5. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	78 %
		6. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL V yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	6,0 %
11.	Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting	1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	3 (integrated)

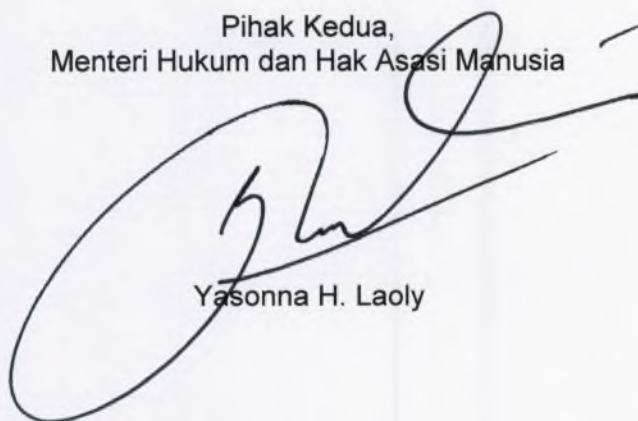
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
12.	Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	1. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	52 %
		2. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	62 %
		3. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	82 %
		4. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	22 %
		5. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	78 %
		6. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL VI yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	6,0 %
13.	Terimplementasinya Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar	1. Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM	1 Rekomendasi
14.	Mengoptimalkan Efektivitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	1. Indeks RB ITJEN	14,17
		2. Nilai SAKIP ITJEN "Baik"	82,88
		3. Nilai Maturitas SPIP ITJEN	Level 3 - Terdefinisi
15.	Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal yang Berkualitas, Berintegritas dan Profesional	1. Presentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi	82 %
		2. Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham	3
16.	Mengembangkan Kualitas Sistem Informasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Andal dan Responsif	1. Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/Pengendalian Internal	82 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
17.	Terwujudnya Layanan Kantor yang Akuntabel	1. Persentase Realisasi Layanan Perkantoran yang Akuntabel	85 %
		2. Jumlah Layanan Fasilitas Kerumahtanggaan, BMN, dan Sarpras Internal	12 bulan layanan
18.	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Inspektorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel	1. Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel	WTP
		2. Persentase Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Inspektorat Jenderal	87 %
		3. Persentase Rekomendasi atas Penyusunan RKA-KL ITJEN yang Ditindaklanjuti	95 %

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Dukungan Manajemen	Rp. 74.461.972.000,-
1.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	Rp. 5.599.719.000,-
2.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	Rp. 5.599.719.000,-
3.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	Rp. 5.599.719.000,-
4.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	Rp. 5.599.719.000,-
5.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	Rp. 5.599.719.000,-
6.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI	Rp. 10.107.977.000,-
7.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 36.355.400.000,-

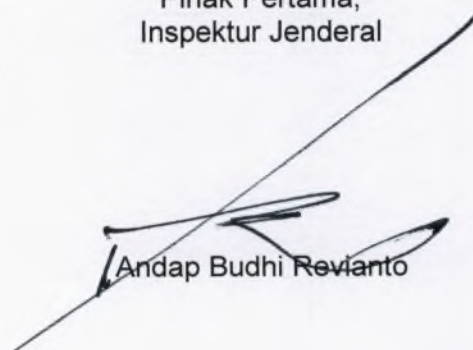
Jakarta, Desember 2020

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,
Inspektur Jenderal



Andap Budhi Revianto



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTUR JENDERAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andap Budhi Revianto

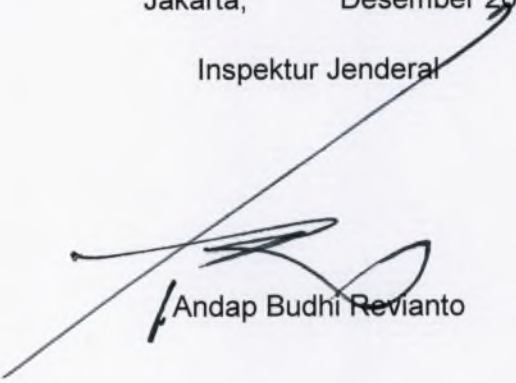
Jabatan : Inspektur Jenderal

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Desember 2020

Inspektur Jenderal



Andap Budhi Revianto